

**IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF PEMIDANAAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**TRISNAULAN ARISANTI
NIM: 201620380211018**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JULI 2019**

**IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF PEMIDANAAN**

**TRISNAULAN ARISANTI
201620380211018**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at / 12 Juli 2019**

Pembimbing Utama



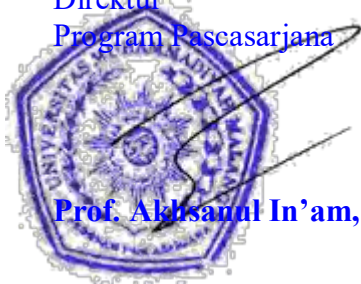
Mokh. Najih., Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Haris Tofly

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Mokh. Najih., Ph.D

TESIS

TRISNAULAN ARISANTI
201620380211018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jum'at / **12 Juli 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Mokh, Najih, Ph.D

Sekretaris / Penguji : Dr. Haris Tofly

Penguji : Dr. Tongat

Penguji : Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **TRISNAULAN ARISANTI**

NIM : **201620380211018**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2019

Yang menyatakan,



TRISNAULAN ARISANTI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji yang senantiasa kita dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini tanpa ada batasnya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah zaman dengan kegigihannya dan keikhlasannya, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh rahmat ini.

Dengan ridha Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya berupa keimanan, ketegasan, kekuatan, kegigihan, ketekunan, kesabaran serta keikhlasan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini dengan baik dan lancar, yaitu dengan judul **IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN** yang merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan banyaknya dukungan baik secara moril dan materiil dari keluarga, saudara, pembimbing dan berbagai pihak terkait, tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis sesuai waktu yang diinginkan. Berbagai macam hambatan, godaan, dan kekecewaan merupakan sebuah konsekuensi untuk dihadapi dalam berjuang dan berproses. Jiwa optimisme dan rasa cinta kasih yang menjadi pondasi oleh penulis untuk tetap fokus serta *istiqomah* dalam menyelesaikan tesis sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis sudah sepatutnya menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Mokh. Najih, Ph.D., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Pembimbing I (satu) penulisan hukum ini yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Haris Tofly, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Keluarga yaitu Ibu Nur Ainun Susanti dan Bapak Made. S. Ardjana selaku orang tua penulis, Agus Gede Mahendra dan Komang Rai Warmawan selaku kakak kandung penulis, yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta menjadikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Batu tahun 2018 s/d 2020, Ibu Dr. Sri Heny Alamsari SH. MH yang banyak memberikan bimbingan dan ilmu serta pelajaran berharga bagi penulis;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Batu tahun 2020, Bapak Dr. Supriyanto, SH. MH., yang banyak memberikan bimbingan dan ilmu serta pelajaran berharga bagi penulis;
9. Bapak Deddy Agus Oktavianto SH, MH., selaku kasi Intel Kejaksaan negeri Batu yang selalu memberikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan kepada penulis;
10. Rekan-rekan jaksa serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Batu yang banyak memberikan dukungan kepada penulis.
11. Rekan-rekan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri batu dan Kejaksaan Negeri Malang yang banyak memberikan dukungan kepada penulis;
12. Abshar Ridwan Kusumo selaku putra penulis yangs selalu memberi semangat dan keceriaan, Sufik Maro beserta keluarga, Siska, Sapta, Ira,

Shinta, Windy, Endah, Sonya, Utiek selaku sahabat sahabat penulis.
Bhawikarsu 98 serta alumni FH UB 99 yang banyak berbagi ilmu dan semangat ;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan beribu-ribu kasih sayangnya atas dukungan, kebaikan, pengorbanan, perjuangan, keikhlasan dan kesabarannya. Penulisan hukum ini sudah dilakukan dengan pengkajian secara ilmiah dan dibimbing oleh pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Besar harapannya untuk diberikan saran dan masukan untuk kebaikan bersama. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat. Aamiin.

Billahitaufiqwalhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 12 Juli 2019

TRISNAULAN ARISANTI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
Abstrak	x
<i>Abstract</i>	xi
PENDAHULUAN	1
RUMUSAN MASALAH	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)	5
Teori Tujuan Pidana	6
Tujuan Pidana Dalam RUU KUHP	9
METODE PENELITIAN	11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Penerapan Pidana Denda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	12
Pemenuhan Tujuan Pidana Denda dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika	23
Evaluasi dan Reformulasi Pidana yang Dapat Dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat Menimbulkan Efek Jera	26
KESIMPULAN	32
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data tindak pidana narkoba di Kota Malang tahun 2015-2017.....	3
Tabel 2: Terpidana yang masuk LP Kelas I Lowokwaru Malang tahun 2015-2018.....	4
Tabel 3: Terpidana yang membayar denda di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018.....	4
Tabel 4: Terpidana yang masuk LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018...	12
Tabel 5: Jumlah terpidana narkoba bari di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018.....	13
Tabel 6: Jumlah terpidana Residivis Narkoba di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018.....	13
Tabel 7: Terpidana yang membayar denda di LP Kelas I Malang dari tahun 2015-2018..	23
Tabel 8: Terpidana yang lebih memilih menjalani subsidair / pidana kurungan pengganti denda di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018.....	24
Tabel 9: Perbedaan UU No. 35/2009 dan UU No. 36/2009.....	31



IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN

TRISNAULAN ARISANTI

trisnaulan@gmail.com

Mokh. Najih, Ph.D (NIDN. 0017056501)

Dr. Haris Tofly (NIDN. 001307671)

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Pelaksanaan putusan hakim dalam penerapan pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinilai tidak efektif dikarenakan adanya pidana pengganti denda. Hal ini menyebabkan banyaknya terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah menyelesaikan pidana penjara pokok akan memilih untuk berada di lembaga pemasyarakatan demi menyelesaikan pidana penjara pengganti denda. Pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum berjalan efektif, selain itu terpidana kasus tindak pidana narkotika akan secara otomatis diwajibkan untuk menjalankan pidana pengganti denda berupa pidana penjara. Dengan demikian perumusan ancaman pidana denda dengan jumlah yang sangat tinggi juga tidak tepat untuk dijadikan alat guna mencapai tujuan pemidanaan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai konsep pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini hendaknya dilakukan reformulasi terhadap kebijakan pidana denda tersebut dimana pidana denda tersebut wajib dibayar misal dengan cara mengangsur atau pidana kurungan pengganti denda dibuat juga lebih lama).

Kata Kunci: Pidana denda, tindak pidana narkotika, pemidanaan

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL FINES IN LAW NUMBER 35 OF 2009
CONCERNING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS IN CRIMINAL
PERSPECTIVE**

TRISNAULAN ARISANTI

trisnaulan@gmail.com

Mokh. Najih, Ph.D (NIDN. 0017056501)

Dr. Haris Tofly (NIDN. 001307671)

Masters of Law

Directorate Postgraduate Program University of Muhammadiyah Malang

Abstract

The implementation of a judge's decision in the application of a fine according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is considered ineffective due to a criminal substitute for fines. This led to many narcotics criminal cases that have completed the imprisonment of the principal would prefer to be in prison for the sake of complete replacement imprisonment penalties. Criminal penalties in Law Number 35 of 2009 have not been effective, other than those convicted of narcotics crimes cases will automatically be required to carry out criminal substitutes for imprisonment. Thus the formulation of a very high amount of criminal penalties is also not appropriate to be used as a tool to achieve the specific purpose of punishment, for this reason, it is necessary to renew the concept about criminal penalties in the Narcotics Law. Which in this case, reformulation of the criminal policy of the fine should be carried out where the criminal fine must be paid, for example by way of installments or imprisonment instead of fines made also longer.

Keywords: Mulct criminal, narcotics crimes, penalty

PENDAHULUAN

Pemidanaan di Indonesia bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹ Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat melainkan supaya orang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) berhenti berbuat jahat dan orang lain enggan melakukan perbuatan serupa dan menimbulkan *deterrence effect*. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku.²

Sayangnya saat ini di semua jenis kejahatan semakin bertambah marak dan tidak ada perubahan. LAPAS sebagai tempat pembinaan malah menjadi wadah bagi para penjahat bertukar ilmu sehingga para penjahat itu sekeluarnya dari pembinaan lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi jera melainkan semakin mahir dalam melancarkan aksinya. Pada akhirnya dengan semakin banyaknya penjahat yang ahli menambah beban kepada masyarakat karena ancaman yang timbul makin besar. Sanksi kepada pelaku kejahatan menjauhkan nilai-nilai kemanusiaan atau dehumanisasi atau pengasingan dari masyarakat selama ia kehilangan hak kemerdekaannya. Ketidakefektifan sanksi pidana yang diterapkan sebagai salah satu faktor ditambah faktor lain yaitu tidak ada rasa malu yang timbul dari para pelaku setelah berbuat jahat. Para pelaku justru makin berani bertindak tanpa menunjukkan rasa bersalah setelah perbuatan kejahatan sebelumnya. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ada 2 (dua) yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana untuk pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenai dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun hampir semua pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh terpidana

¹ Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5

² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 66

melainkan terpidana memilih alternatif sanksi pengganti denda yaitu subsider penjara yang di dalam Undang-Undang adalah maksimal 1 (satu) tahun.

Saat ini di dunia internasional dan Indonesia sendiri sedang mencari alternative dari pidana perampasan kemerdekaan/penjara pertimbangannya karena jenis pidana ini semakin tidak disukai dilihat dari pendekatan kemanusiaan, pendekatan filosofis serta pertimbangan ekonomis.³ Kepala Bagian Humas dan Protokoler Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Akbar Hadi Prabowo mengatakan, usulan pengurangan porsi hukuman penjara mengemuka sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Dari 180.000 narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia, 60 persen merupakan narapidana narkoba, yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan perawatan dan rehabilitasi.⁴

Penetapan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan kentalnya nuansa prinsip kepastian yang hendak dituju, padahal terdapat perbedaan antara keadilan dengan hukum yang diterapkan. Wilayah keadilan tidak atau belum tentu sama dengan wilayah hukum positif, sehingga timbul jarak antara hukum (undang-undang) dengan keadilan yang kemudian diistilahkan dengan keadilan prosedural di satu pihak dan keadilan substantif menurut undang-undang.⁵

Dengan begitu pesatnya kuantitas tindak pidana narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu sehingga timbul pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apa yang menyebabkan penjara-penjara di Indonesia dipenuhi oleh narapidana narkoba yang tidak sedikit terus melakukan pengulangan tindak pidana narkoba/residivis. Salah satu pemidanaan yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 adalah pidana denda selain penjara. Pidana denda dapat dikatakan sebagai pidana pokok tertua dalam jenis-jenis pidana pokok dalam hukum Indonesia yang bahkan lebih tua dari pidana penjara dan lebih awal ada dibanding

³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h. 7.

⁴ Krisiandi, 2016, *Pidana Alternatif Perlu Didorong*. dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/20460671/pidana.alternatif.perlu.didorong>, diakses tanggal 6 April 2017

⁵ FX Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam perspektif Studi Hukum Kritis"*, cet. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, h. 34.

pidana mati. Penerapan pidana denda ada dalam setiap dinamika social masyarakat, bahkan sudah ada sejak jaman masyarakat primitive dan sudah dapat dieteksi keberadaannya dari Jaman Majapahit.⁶ Pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk kewajiban bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran larangan untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau untuk menebus kesalahannya dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu.⁷ Pidana denda telah menjadi salah satu bentuk alternative hukuman yang diancamkan dengan pidana kurungan untuk sebagian besar pelanggaran yang ada dalam KUHP Buku II dan Buku III serta Undang Undang khusus di luar KUHP termasuk pula UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana denda diharapkan memberi efek jera sekaligus memberi tambahan pemasukan keuangan bagi negara.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari petugas Bendahara Penerima di Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Batu yang bertugas mencatat penerimaan denda dari eksekusi putusan hakim selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai sekarang tidak ada satupun terpidana narkotika yang membayar pidana denda berdasarkan putusan hakim dikarenakan jumlahnya yang dianggap tidak logis.⁸ Di wilayah Kota Malang sendiri didapatkan data tindak pidana Narkotika sebagaimana berikut:⁹

Tabel 1 Data Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2015	138
2	2016	194
3	2017	117
	Jumlah	449

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Malang

⁶ IA. Budiwaja, Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, Vol XIX, No. 19 2010 h. 78 diakses tanggal 6 April 2018.

⁷ *Ibid*

⁸ Wawancara dengan Sdri Antik, Sdr. Supardi dan Sdr. Teguh, selaku Bendahara Penerima Eksekusi Putusan Hakim di Kejaksaan Negeri se-Malang Raya, pada tanggal 4 September 2018

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Menurut data dari LP Kelas I Lowokwaru Malang diperoleh data mengenai adanya peningkatan jumlah terpidana yang masuk ke LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018, sebagai berikut:

Tabel 2 Terpidana yang Masuk LP Kelas I Lowokwaru Malang Dari Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	305
2016	359
2017	700
2018	937

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terpidana narkoba yang masuk ke LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman atau pemidanaan yang sekarang diterapkan untuk memberikan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba dapat dibilang belum efektif.

Sedangkan terpidana yang membayar denda berdasarkan putusan pengadilan di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018 adalah:

Tabel 3 Terpidana yang Membayar Denda di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	0
2016	1
2017	0
2018	0

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terpidana yang membayar pidana denda yang sudah diputus oleh pengadilan di LP Kelas I Lowokwaru Malang hanya berjumlah 1 (satu) orang di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada para terpidana narkoba dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini mengakibatkan beberapa implikasi yang akan diteliti dan dijelaskan lebih lanjut

pada penelitian ini. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan denda itu sendiri dan ketidak efektifannya.

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, dalam penelitian ini perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah mengenai permasalahan pemidanaan yang dapat memberi alternatif terhadap pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika di Indonesia. Agar tepat sasaran dalam pembahasan permasalahan, maka sebagai fokus atau pembatasan permasalahan dalam penelitian ini, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait penerapan pidana denda?
2. Apakah pidana denda yang berlaku saat ini sudah memenuhi tujuan pemidanaan dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika?
3. Formulasi pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana Narkotika agar dapat menimbulkan efek jera?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Filosof hukum ternama dari Jerman bernama Gustav Radbruch¹⁰ memperkenalkan konsep tiga ide unsur dasar hukum pada masa Perang Dunia ke-II. Konsep dasar unsur ini kemudian hari oleh para pakar hukum disebut sebagai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pada kenyataannya seringkali kepastian hukum berbenturan dengan dengan keadilan, kemanfaatan berbenturan dengan keadilan hukum, kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh saat hakim mengambil keputusan yang menurut pendapat hakim adil maka akan mengorbankan rasa adil dari pihak lain. Apabila ingin menegakkan keadilan maka ada kemanfaatan dan kepastian hukum yang dikorbankan, Walaupun antara penggugat dan tergugat memiliki rasa terhadap nilai adil yang bervariasi. Kepastian hukum atau Keadilan bisa saja lebih diutamakan daripada

¹⁰ Setio Dwi, 2016, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*. dari <http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, diakses tanggal 18 April 2017

unsur lain sehingga mengorbankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang lebih luas.

Untuk teorinya tersebut maka Gustav Radbruch menyusun prioritas yang mana posisi pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan hukum dan terakhir adalah kepastian hukum. Hukum berjalan dalam fungsi sebagai alat pemelihara kepentingan manusia di dalam masyarakat. Hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai yang menimbang hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Serta hukum memberi wewenang dan mengatur cara pemecahan masalah hukum dan menjaga kepastian hukum.

Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan dan teori gabungan menjadi pandangan integrative dalam tujuan pidana yang menganggap bahwa adanya pluralitas dalam tujuan pidana, bahwasanya dari dua teori ini menggabungkan ide Utilitarian dan Retributivist. Dari sisi pandang utilitarian, menyatakan tujuan pidana harus mampu menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan serta pandangan *retributivist* yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai bilamana tujuan yang *Theological* tersebut dicapai dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana antara lain:

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori absolut/retribusi, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang atau pelaku telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant menganggap pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menginginkan suatu tuntutan keadilan.¹² Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini tampak pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 38

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, h. 19

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan suatu tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹³

Tentang teori pembalasan di atas, ahli hukum Andi Hamzah memiliki pandangan seperti berikut:¹⁴ Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak mempunyai tujuan untuk sesuatu yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Dirasa tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut.

2. Teori Tujuan/Relatif

Penganut teori tujuan/relatif memandang sesuatu yang dapat di[ergunakan agar tercapai suatu pemanfaatan, baik terkait dengan orang yang bersalah sebagai pelaku maupun yang terkait dengan dunia luar, missal dengan cara mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial melakukan pengulangan kejahatann maka duania akan menjadi tempat yang lebih baik.

Dasar membenaran tentang adanya suatu pidana menurut teori tujuan/relatif adalah pada tujuannya. Pidana dijatuhkan tidak sekedar karena seseorang melakukan kesalahan (*quia peccatum est*) namun supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Berdasarkan hal tersebut maka cukup jelas bahwa teori tujuan/relatif berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori relatif dan teori absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan ppidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 39

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 20

ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁶ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan: menitikberatkan unsur pembalasan tapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebut dalam bukunya yang berjudul "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna untuk kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.¹⁷

4. Teori Integratif

Teori Integratif disampaikan oleh Muladi, yang merupakan Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang menyatakan: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks karena juga lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁸

Pendekatan sedemikian menyebabkan adanya suatu keharusan untuk memilih teori integrative tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsi sebagai bentuk antisipasi dan mengatasi akibat-akibat seperti kerusakan yang timbul dari

¹⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, h. 25

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, h. 41

¹⁸ Muladi, *Op. Cit*, h. 16

adanya suatu tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integrative tentang tujuan pemidanaan ini berdasarkan berbagai alasan baik sifatnya sosiologis, yuridis serta ideologis. Alasan yang bersifat sosiologis dapat dilihat dari pandangan Stanley Grupp dimana kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian akan syarat-syarat untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan lain yang dapat dilakukan demi menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹⁹

Tujuan Pemidanaan Dalam RUU KUHP

Dalam sudut pandang utilitarian, dikatakan pemidanaan bertujuan harus timbul konseluensi bermanfaat yang bias dibuktikan. Suatu bentuk keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai bila tujuan yang bersifat theological tersebut diwujudkan melalui ukuran prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana harus seimbang tidak boleh melebihi ganjaran yang layak diterima pelaku tindak pidana tersebut sehingga suatu tujuan pemidanaan sangat penting dan dipedomani dalam pemberian dan penjatuan pidana.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis juga menyajikan pemikiran beberapa ahli tentang penerapan pidana denda dalam RUU KUHP dan untuk itu penulis menggunakan RUU KUHP yang dikeluarkan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 118.

- c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderita dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya mengenai penjelasan pasal tersebut mengandung arti bahwa pidanaan merupakan sebuah proses yang mana supaya proses tersebut berjalan seerta peranan hakim dirasa cukup penting. Pasal ini mengkonkretkan sanksi pidana yang ada atau tercantum dalam peraturan tertentu dengan penjatuan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta mengemban tujuan ganda yang ingin dicapai melalui pidanaan.²¹

Sebagaimana tujuan pidanaan yang dicantumkan dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) terkait, J.E. Sahetapy menyampaikan sebagai berikut: Tujuan pidanaan ini sangat penting. Tidak hanya menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d'être* dari teori-teori pidana. Pidanaan yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan semestinya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidanaan dalam kerangka tujuan pidanaan tadi dengan memperhatikan selain rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, juga harus dapat menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dan si korban.²²

Dalam Rancangan KUHP dicantumkan tujuan pidanaan itu terdiri dari pencegahan dalam bentuk usaha prevensi, koreksi pidanaan dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah dari para pelaku atau terpidana sehingga tujuan pidanaan yang semetinya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga bebas dari pikiran pikiran jahat serta dari kenyataan social yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan negara dan masyarakats elama tidak bertentanagn dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sebagaimana ideologi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

²¹ *Ibid.*, h. 138.

²² *Ibid.*, h. 142.

Konsensus atau kesepakatan tujuan pemidanaan adalah tanggungjawab kita Bersama yaitu untuk menggali lebih dalam lagi apa yang sesuai dan mewujudkannya khususnya bagi aparat pelaksana khususnya penegak hukum. Pemidanaan merupakan proses dinamis yang terdiri dari penilaian yang dilakukan secara kontinyu serta seksama terhadap sasaran yang akan dicapai dan konsekuensi yang bias dipilih akan keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan (*gerechtigheit*).²³

Masyarakat berharap terwujudnya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, tercipta ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat juga berharap adanya manfaat dalam penegakan hukum karena hukum diciptakan demi kepentingan manusia dan harus memberi manfaat pada manusia itu sendiri. Walaupun tujuan hukum adalah mencapai keadilan akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan, hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.²⁴

Dalam penegakan hukum agar tercipta suatu keseimbangan atau pola relasi yang sinergis maka perlu adanya keterpaduan antara semua instansi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan yang disebut sebagai integrated criminal justice system atau system peradilan pidana terpadu. Dalam hal suatu kejahatan sampai melibatkan yurisdiksi dari dua negara atau lebih maka perlu dilihat peraturan peraturan atau kebiasaan kebiasaan internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang disajikan ini merupakan penelitian ilmu hukum sosiologis karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain jadi merupakan studi sosial yang non doktrinal bersifat empiris artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.²⁵

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum sebuah Pengantar*, Edisi ke4, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145.

²⁴ *Ibid.*, h. 146

²⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 3

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Penerapan Pidana Denda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di LP Kelas I Lowokwaru Malang diperoleh data mengenai jumlah terpidana yang masuk ke LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4 Terpidana yang Masuk LP Kelas I Lowokwaru Malang Dari Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	305
2016	359
2017	700
2018	937

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terpidana narkotika yang masuk ke LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup pesat. Dari jumlah terpidana narkotika dari tahun 2015-2018 yang masuk, terdapat juga terpidana narkotika baru, yaitu:

Tabel 5 Jumlah Terpidana Narkotika Baru di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	225
2016	305
2017	552
2018	747

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Selain terpidana narkotika baru, terdapat juga residivis perkara narkotika yaitu terpidana narkotika yang sudah pernah terjerat kasus narkotika sebelumnya dan melakukan pengulangan. Adapun jumlah residivis narkotika yang masuk ke LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah:

Tabel 6 Jumlah Terpidana Residivis Narkotika di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	50
2016	54
2017	148
2018	190

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5 dan 6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah terpidana narkotika baru di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Selain itu jumlah terpidana residivis narkotika di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami kenaikan yang pesat.

Berdasarkan keseluruhan tabel di atas, dengan kenaikan yang sangat pesat jumlah terpidana narkotika dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa hukuman atau pemidanaan yang sekarang diterapkan untuk memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda bagi penyalahguna narkotika dapat dibilang belum efektif. Sebagai alternatif, sebaiknya hakim dalam memberikan putusan tidak perlu menggunakan pidana denda akan tetapi dengan memberikan hukuman penjara maksimal menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu,²⁶ sementara itu menurut pandangan Roslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan kepada Negara kepada pembuat delik.²⁷ Penjatuan nestapa atau derita ini dilakukan melalui sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah suatu jenis sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pidana yangs ekiranya mengganggu kepentingan umum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, tetapi tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁸

Pidana denda merupakan suatu bentuk pidana tertua. Sebagaimana dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur jenis-jenis pidana bahwa pidana pokok antara lain adalah pidana mati, kurungan dan denda. Pidana tambahan adalah antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Pidana denda sendiri ada dan tumbuh dalam setiap masyarakat dan ditemukan sudah ada sejak masyarakat primitif meskipun bentuknya bersifat primitif pula. Di negara kita, pidana denda sudah ditemukan sejak jaman Majapahit dan masyarakat tradisonal lain. Untuk pidana denda sendiri dicantumkan atau diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi:

1. Banyaknya denda sekurang kurangnya duapuluhlima sen
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan;
3. Lamanya hukuman kurunagn pengganti sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;
4. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 (satu) hari, bagi denda yang lebih

²⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, h. 8

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 81

²⁸ *Ibid*

- besar daripada itu, maka tiap tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada 1 (satu) hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun satu hari;
5. Hukuman kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan karena beberapa kejahatan yang dilakukan karena berulang-ulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52;
6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan.

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.

Dengan demikian, pidana dan ppidanaan sebagai ilmu atau penologi akan terkait erat dengan filosofi ppidanaan. Pidana dan ppidanaan sebagai filsafat, sudah barang tentu akan selalu mengalami 'ketidakpuasan'. Karena itu, tidak mengherankan bila Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli-ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Pengertian Narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun banyak masyarakat menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Dalam beberapa kasus tindak

pidana narkoba yang terjadi tidak jarang hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda. Jika dihubungkan dengan tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana khusus, sanksi pidananya penjara dan denda. Pidana denda dapat diganti dengan kurungan, bahkan dapat diperhitungkan secara harian menurut pertimbangan, oleh karena itu dirasa kurang adil jika denda yang dijatuhkan disamakan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga di Negara-negara Skandinavia denda diperhitungkan menurut hari, sehingga jumlah denda yang harus dibayar ialah sebanyak pendapat harian setiap terpidana.

Dalam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana denda, hakim wajib langsung menetapkan berapa lama kurungan pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa jika ia tidak mampu ataupun tidak mau untuk membayar denda dengan berbagai macam pertimbangan hakim.

Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang UU Narkoba menyebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana narkoba yang tidak dapat membayar denda maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun. Berarti terhadap tindak pidana khusus seperti narkoba pun, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim nantinya, namun di dalam tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana khusus, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara lain halnya dengan tindak pidana yang diatur didalam KUHP yang diganti dengan pidana kurungan. Karena dengan adanya asas *Lex Specialist Derogaat Legi Generalis*, dimana aturan khusus mengenyampingkan aturan umum.

Pidana denda merupakan alternative pemidanaan yang diakodir negara sebagai bentuk politik criminal dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia. Hal ini dapat tampak dari banyaknya serta beragamnya pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam RKUHP ancaman pidana denda ada dalam semua ancaman pidana pada setiap pasal tentang kejahatan. Pengaturan pidana denda dalam Undang Undang Narkoba diformulasikan dalam bentuk akumulasi ancaman perampasan kemerdekaan dengan pidana denda. Sehingga terhadap pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran pasal

yang didalamnya diatur secara kumulatif pidana denda dan perampasan kemerdekaan sehingga hakim harus memutuskan secara bersamaan keduanya pidana denda dan pidana penjara.²⁹

Dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tersebut bila dibandingkan dengan Undang Undang yang digantikan sebelumnya yaitu Undang Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang narkotika dapat dimati ancaman pidananya jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, UU No 22 Tahun 1997 ancaman maksimal denda sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). Maka pada UU No. 35 Tahun 2009 pidana denda maksimal mencapai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Ancaman pidana denda yang tinggi yang diakumulatikan dengan pidana perampasan kemerdekaan dalam UU Narkotika sebagai indikator bahwa Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang serius yang mana perlu dilabeli ancaman pidana yang berat yang membuat calon pelaku berpikir ulang baik bagi pelaku baru maupun pelaku yang akan melakukan pengulangan karena tidak hanya dijatuhkan pidana penjara tapi juga denda.³⁰

Ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diancam secara kumulatif dengan pidana penjara. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang di dalamnya diatur secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama. Hampir semua hakim berpendapat bahwa pidana denda pada perkara narkotika bertujuan untuk memperberat sanksi pidana. Sementara itu, hanya sedikit hakim yang lain menyatakan bahwa pidana denda pada perkara narkotika bertujuan untuk memberikan pelajaran bahwa narkotika tidak memberikan keuntungan pada pelaku kejahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa para hakim kebanyakan memandang bahwa narkotika adalah perkara yang serius, hingga perlu diberi ancaman pidana yang berat, yang tidak hanya penjara tetapi juga denda.³¹

Akumulasi dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dengan tujuan terjaminnya rasa keadilan di masyarakat

²⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 68

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 70

sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman.³² Tujuan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang (*general preventie*), sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi kejahatan yang sudah terlanjur terjadi. Jika merujuk pada undang-undang pidana, hal ini sejalan karena terjadi peningkatan maksimal ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan ancaman pidana denda milyaran rupiah. Perlu diingat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah pemenuhan rasa keadilanmaka dalam perwujudannya perlu ditpertimbangkan hal-hal berupa tujuan berikutnya, yaitu (1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik ditujukan pada orang banyak (*general preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau (2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³³

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN. Mlg

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

a. MENGADILI

- a) Menyatakan terdakwa HENDRA HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

³² Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pusat Tudi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994, h. 34

³³ *Ibid*

- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e) Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- f) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- g) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 bekas bungkus rokok LA Mild isi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu diguung kertas alumunium foil berisi shabu seberat 0,017 gr,
 - 2.) 1 (satu) buah handphone merk ACER

b. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- a) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Mlg

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

a. MENGADILI

- a) Menyatakan terdakwa NOVAN PRASETYO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan tdw tetap berada di dalam tahanan;
- e) Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
 - 2) 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;

b. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- a) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
- b) Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

3. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2017/PN.Mlg

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

a. MENGADILI :

- a) Menyatakan Terdakwa AHMAD CHOIRI BIN AHMAD seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “SECARA TANPA HAK MENYIMPAN ATAU MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c) Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan agar Tdw tetap berada di dalam tahanan;

e) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah berkas bungkus rokok LA warna merah;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia merah dengan nomor simcard 089694006007;

b. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- a) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Selain ketiga putusan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbandingan penulis masukkan juga putusan yang terkait dengan pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN.Mlg, yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

1. MENGADILI:

- a. Menyatakan terdakwa CAHYO WARDOYO ALS. CILOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok grendel berisi 53 tik masing-masing berisi 9 butir dan 1 tik berisi 8 butir tablet warna putih

berlogo ££ dan 1 bungkus plastik berisi 43 butir pil warna putih berlogo ££ dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan di atas di satu pihak dalam menjatuhkan putusan pidana denda hakim menentukan sendiri pidana apa yang sesuai dengan terdakwa, namun di lain pihak hakim juga memberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih apakah dia mampu untuk membayar pidana denda atau menjalankan pidana kurungan pengganti denda. Karena itu merupakan hak dari terpidana untuk memilih pidana apa yang akan ia jalankan. Dalam prakteknya lebih banyak terpidana memilih untuk menjalankan kurungan daripada membayar denda, apalagi dalam perkara narkoba dimana salah satu contohnya dimana pidana denda ditetapkan sebesar 800 juta sampai 1 milyar. Sekadar apapun orang tidak akan mau untuk mengeluarkan uang sebesar itu, lebih baik dia menjalankan kurungan pengganti yang paling lama hanya 2 tahun saja yang dalam putusan di atas hanya 2-3 bulan.

Seandainya pasal-pasal itu hanya menyebutkan ancaman pidana denda saja, maka hal ini berakibat seseorang tidak akan membayar atau melunasi pidana denda yang dibebankan kepadanya tidak dapat diberi sanksi dengan jenis sanksi lainnya, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan hal ini sudah tentu akan mengakibatkan sulitnya menegakkan suatu keadilan di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu, pidana denda ini diberikan alternatif pembayarannya yaitu pidana kurungan atau pidana penjara (bagi tindak pidana narkoba), karena tidak semua terpidana yang akan mampu untuk membayar denda dengan jumlah yang besar. Maka dari itu untuk pidana kurungan pengganti pidana denda ini harus dipandang sebagai alat pemaksa agar pidana denda itu sendiri dapat dipatuhi dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu membuat seseorang sadar akan kesalahan yang dilakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka tepat jika pidana denda itu ada alternatif pembayarannya, karena tidak semua orang akan sanggup untuk membayar sejumlah uang. Dimana tujuan pidana itu sendiri adalah membuat jera pelaku bukan

untuk memiskinkan pelaku. Cara perhitungan lamanya pidana kurungan pengganti denda ditetapkan di dalam Pasal 30 ayat (4) KUHP, namun jika dilihat besarnya jumlah nominal uang yang terdapat di dalam KUHP tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, ini bahkan jauh perbedaannya. Jika aturan ini tetap menjadi patokan hakim dalam menentukan besarnya denda dengan lamanya kurungan pengganti denda maka dirasa tidak seimbang dan tidak adil.

Akan tetapi dalam putusan di atas antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penjatuhan pidana denda terdapat kesenjangan yang sangat mencolok yaitu denda yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkisar antara Rp.800 juta-Rp.1 miliar sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya diputus Rp.1 juta.

Pemenuhan Tujuan Pemidanaan Pidana Denda dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di LP Kelas I Lowokwaru Malang, diperoleh data mengenai pembayaran pidana denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di LP Kelas I Lowokwaru Malang sebagai berikut:

Tabel 7 Terpidana yang Membayar Denda di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	0
2016	1
2017	0
2018	0

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Sedangkan jumlah terpidana narkotika di LP Kelas I Lowokwaru Malang yang lebih memilih untuk menjalani subsidair atau pidana kurungan pengganti denda daripada membayar denda dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 8 Terpidana yang Lebih Memilih Menjalani Subsida/Pidana Kurungan Pengganti Denda di LP Kelas I Lowokwaru Malang dari tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah (orang)
2015	305
2016	358
2017	700
2018	937

Sumber: LP Kelas I Lowokwaru Malang, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terpidana yang membayar pidana denda yang sudah diputus oleh pengadilan di LP Kelas I Lowokwaru Malang hanya berjumlah 1 (satu) orang di tahun 2016. Sedangkan menurut tabel 8 dapat dilihat bahwa hampir semua terpidana narkoba lebih memilih untuk menjalani pidana subsidair/pidana kurungan pengganti denda. Hal ini mengindikasikan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada para terpidana narkoba dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan jumlah pidana denda yang besar tidak diimbangi dengan lamanya pidana kurungan pengganti denda.

Ringannya kurungan pengganti dari pidana denda dipandang masalah dalam penerapan pidana denda, berdasarkan pemikiran apabila setelah penjatuhan pidana denda tersebut maka terpidana membayar pidana dendanya sehingga dianggap penjatuhannya efektif. Namun bila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terpidana maka penjatuhan pidana denda tersebut dianggap tidak efektif. Denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dibayar oleh terpidana bukan saja oleh karena terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi juga karena kurungan pengganti denda (subsider) dirasa cukup ringan, sehingga pilihan akhir terpidana adalah menjalani pidana kurungan pengganti dibandingkan membayar pidana dendanya.

Penerapan pidana denda dalam pemenuhan tujuan pemidanaan dianggap memberikan banyak keuntungan dan rasa keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey bahwa:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya.

2. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsider
3. Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana
4. Pidana denda akan membuat lega dunia prikemanusiaan
5. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.³⁴

Untuk Kasus Narkotika, saat hakim memutus suatu perkara dengan memberikan sanksi denda atas kasus narkotika hakim mengambil pertimbangan dari beberapa hal, antara lain: jumlah dan jenis barang buktikondisi ekonomi terpidana, peran pelaku kejahatan, residivis, hasil kejahatan, pendapat masyarakat, dan tuntutan jaksa.

Berbeda halnya dalam kasus penyalahguna Narkotika dalam hal ini pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena posisinya sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Disini sebagaimana ketentuan Undang Undang untuk pecandu Narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain juga dianggap sebagai korban.

Pecandu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan pidana di dalam undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.³⁵

Penyalahguna Narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban *dimana pelaku dan korban dianggap*

³⁴ Sutherland & Cressey, *The Control Crime*, Dalam “Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana”, Sudjono, Tarsito, Bandung, 1974, h. 487

³⁵ Niniek Suparni, 2012, *Op. Cit*, h. 72

tunggal atau satu, artinya selain sebagai pelaku ia juga korban, selain sebagai korban ia juga adalah pelaku. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus, penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Hal ini berbeda dengan kejahatan lain yang jatuhnya korban jelas terlihat seperti kejahatan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan.

Evaluasi dan Reformulasi Pidana yang Dapat Dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat Menimbulkan Efek Jera

Tindak pidana narkotika dengan kecenderungan melibatkan banyak orang dengan jumlah korban yang semakin banyak. Sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemberatan sanksi pidana, termasuk disini adalah dalam bentuk pidana minimum khusus, dengan maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana narkotika tersebut.

Pada dasarnya merumuskan suatu undang-undang merupakan pekerjaan berat dan sulit, harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan.³⁶ Suatu rumusan undang-undang harus memenuhi beberapa asas³⁷, yaitu:³⁸

1. Asas *lex scripta*, yakni ketentuan pidana harus sudah dirumuskan lebih dahulu. Selain dapat memberikan kepastian hukum, akan juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum.
2. Asas *lex certa*, yakni rumusan ketentuan perundangan harus jelas.

³⁶ E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 63

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 33. Dalam Yasser S.. Wahab, Julianto, Kalalo dan Lisa Mery, Penggunaan email Sebagai Sarana Beracara Contante Justise Pada Pengadilan Di Indonesia, *Hasanusin Law Review*, Volume I Issue 2, August 2015, h. 196

³⁸ Marjane Termoshuizen Art, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda, Makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana *Same Root Different Development*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April, 2006, h. 2

3. Asas *lex stricta*, yakni cara merumuskannya harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya.

Bertolak dari pemikiran sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan, maka konsep/Rancangan KUHP Baru merumuskan tujuan pemidanaan bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu.³⁹ Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Bab III Buku I Konsep Rancangan KUHP Baru tersebut, khususnya Pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan pemidanaan, dengan adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*) dan pada pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

1. Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain s pelaku, dengan kata

³⁹ Andi Hamzah, *Op, Cit*, h. 6

⁴⁰ Sudarto, *Op, Cit*, h. 67

lain yakni dengan adanya ancaman hukuman minimum diharapkan orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan serupa, sebab hukuman yang dijatuhkan terhadap si pelaku pastinya lebih berat karena adanya batas minimum tersebut.

2. Pencegahan khusus ialah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan dengan batas minimum diharapkan terpidana menjadi jera sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang pidana khusus termasuk dalam rangka politik kriminal, yaitu usaha masyarakat dengan perantaraan berbagai organ pemerintah untuk secara rasional menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dengan munculnya ancaman pidana minimum khusus ini dapat menunjang tercapainya tujuan dari politik kriminal tersebut.⁴¹ Kecenderungan Internasional juga mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu dikatakan oleh Muladi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional.⁴² Adapun mengenai 7 (tujuh) kecenderungan internasional dapat dijelaskan:⁴³

1. Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu;
2. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternative dari pidana kemerdekaan (alternative sanction)
3. Polarisasi pidana mati
4. Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
5. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
6. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak
7. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);

⁴¹ Danil, E., & Kurniawan, I. (2017). Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating The Eradication Of Corruption, *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 67-76. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717>

⁴² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Bdn Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 2002, h. 15

⁴³ *Ibid*, H. 155.

Tujuan dikembangkannya sanksi minimum khusus pidana tertentu adalah untuk mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana terkait.⁴⁴ Bahwa perlunya minimal khusus ini merupakan perwujudan keresahan masyarakat atau tidak puas masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, utamanya penjatuhannya tindak pidana yang tidak jauh bedanya antara penjahat kelas kakap dan kelas teri.⁴⁵

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana narkoba sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pembuat undang-undang itu sendiri, yang mana dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan: Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Terpidana kasus tindak pidana narkoba yang telah menyelesaikan pidana penjara pokok akan memilih untuk berada di lembaga pemasyarakatan demi menyelesaikan pidana penjara pengganti denda. Patut diketahui bahwa terpidana kasus tindak pidana narkoba yang tengah menjalani pidana penjara pengganti denda merupakan warga binaan yang pada masa pelaksanaan pidana penjara mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana terhadap pidana penjara pokoknya sehingga mereka dapat menyelesaikan pidana penjara pokok lebih cepat. Terpidana kasus tindak pidana narkoba yang telah menjalani pembebasan bersyarat tersebut merupakan warga binaan yang mulai menjalani pidana penjara pokok sejak tahun 2010.

Apabila terpidana kasus tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengajukan pembebasan bersyarat maka sudah tentu

⁴⁴ *Ibid*, h. 156

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, masalah Masalah Hukum*, Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 84

warga binaan tersebut masih menjalani pidana penjara pokok dan belum dapat menjalani pidana penjara pengganti denda mengingat besaran pidana penjara pokok bagi pelaku tindak pidana narkotika pada undang-undang tersebut juga dirumuskan dalam waktu yang sangat lama.

Ancaman pidana dengan jumlah tinggi sebagaimana diatur bagi pelaku *Illicit Drug Trafficking* pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 beserta pelaksanaannya juga dapat ditinjau berdasarkan tujuan yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Pada dasarnya, pembentukan undang-undang ini dilandasi oleh semangat memberantas penyalahgunaan narkotika.

Jumlah ancaman pidana denda yang terlalu tinggi serta rendahnya pidana penjara pengganti denda yang harus dijalani justru menodai fungsi menakut-nakuti dari ancaman pidana denda itu sendiri. Dengan mengetahui bahwa tingginya pidana denda yang dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana penjara pengganti yang sangat singkat dan notabene lebih menguntungkan, tentunya tidak akan melihat tingginya ancaman pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut sebagai hal yang menakutkan. Keadaan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaku untuk tetap melakukan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana narkotika mengingat rendahnya pidana yang benar-benar akan mereka jalani tidak seberat ancaman pidana sebagaimana tertulis dalam undang-undang.

Selain dapat mencederai fungsi prevensi umum, ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi sebagaimana diancamkan bagi pelaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dapat menodai fungsi represif yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Pada dasarnya, perumus undang-undang berharap agar pidana denda yang dirumuskan dalam jumlah tinggi tersebut dapat mengarahkan para hakim pada penjatuhan pidana denda yang bersifat lebih menjerakan.

Bahwa perumusan ancaman pidana denda dalam jumlah tinggi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidaklah tepat guna mengaktifkan kembali kedudukan pidana denda dalam sistem pemidanaan, mengingat pada kenyataannya perumusan ancaman pidana denda yang sangat tinggi justru menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pidana denda yang secara tidak disadari diciptakan sejak awal oleh

perumus undang-undang. Sehingga, pidana denda yang dijatuhkan pun tetap tidak akan efektif. Perumusan ancaman pidana denda dengan jumlah yang sangat tinggi juga tidak tepat untuk dijadikan alat guna mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh perumus undang-undang, terlebih guna mencapai tujuan pemidanaan dalam hal prevensi umum.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Penerimaan di Kejaksaan Negeri Malang⁴⁶ pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) terpidana yang membayar denda untuk membayar denda pengganti subsider kurungan. Kesemuanya merupakan terpidana Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Farmasi, dengan rentang denda yang dibayarkan bervariasi antara Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Denda tersebut masuk ke dalam pelaporan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Hal ini membuktikan bahwa denda yang proporsional dapat dibayarkan oleh terpidana dan menghindari beban Lapas dalam melakukan pembinaan.

Tabel 9 Perbedaan UU No. 35/2009 dan UU No. 36/2009

No	Perbedaan Dalam Hal	UU No. 35/2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
1	Besaran denda	40 juta – 20 miliar	50 juta – 1,5 miliar
	Denda minimum	ada	Tidak ada
2	Sanksi pidana maksimum dan minimum	5 – 20 tahun	1 – 10 tahun
3	Pengganti denda bila tidak dibayar	Pidana penjara paling lama 2 tahun	Mengikuti Pasal umum, Pasal 30 KUHP, paling lama 6 bulan.
4	Jenis-jenis/ kategori tindakan pidana penyalahgunaan	Pemilik Pengguna Bandar	Pimpinan Faskes Penyehat Tradisional Dokter, Bidan, Perawat, Apotek, Perusahaan Farmasi
5	Tujuan Perundang-undangan	Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan	Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan

⁴⁶ Wawancara dengan Erin, Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 30 Agustus 2018

	mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional
6	Pasal yang memuat pidana denda	Pasal 111 – Pasal 148 Pasal 190 – Pasal 201

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan putusan hakim dalam penerapan pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai tidak efektif dikarenakan adanya pidana pengganti denda. Hal ini menyebabkan banyaknya terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah menyelesaikan pidana penjara pokok akan memilih untuk berada di lembaga pemasyarakatan demi menyelesaikan pidana penjara pengganti denda. Patut diketahui bahwa terpidana kasus tindak pidana narkotika yang tengah menjalani pidana penjara pengganti denda merupakan warga binaan yang pada masa pelaksanaan pidana penjara mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana terhadap pidana penjara pokoknya sehingga mereka dapat menyelesaikan pidana penjara pokok lebih cepat.
2. Pidana denda dalam kasus narkotika merupakan pidana pokok yang penerapannya dilakukan bersamaan dengan pidana penjara. Besarannya dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Batasan minimum dan maksimum ketentuan pidana denda ini semestinya digunakan pula oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana pengganti dendanya. Jika batasan maksimum pidana denda adalah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 dapat diartikan sepadan dengan pidana pengganti denda maksimal 2 tahun. Maka semestinya hakim dapat menetapkan pidana pengganti denda yang sepadan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu selama satu bulan. Pertimbangan yang sepadan tersebut demi menghindari disparitas yang terlalu tinggi dalam putusan-putusan pidana pengganti denda dan akan membantu terpidana atau masyarakat untuk mendapatkan keadilan sekaligus

terwujudnya kepastian hukum. Akan tetapi pidana denda yang berlaku saat ini belum memenuhi tujuan pemidanaan dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika.

3. Keberadaan ancaman pidana minimum khusus dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya mempunyai korelasi erat dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain. Pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum berjalan efektif, selain itu terpidana kasus tindak pidana narkotika akan secara otomatis diwajibkan untuk menjalankan pidana pengganti denda berupa pidana penjara. Dengan demikian perumusan ancaman pidana denda dengan jumlah yang sangat tinggi juga tidak tepat untuk dijadikan alat guna mencapai tujuan pemidanaan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai konsep pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini hendaknya dilakukan reformulasi terhadap kebijakan pidana denda tersebut dimana pidana denda tersebut wajib dibayar misal dengan cara mengangsur atau pidana kurungan pengganti denda dibuat juga lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986,
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 53
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Berdasarkan wawancara dengan Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kota Malang.
- Danil, E., & Kurniawan, I. (2017). Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating Eradication of Corruption. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 67-76. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717>.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992,
- E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- FX Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam perspektif Studi Hukum Kritis"*, cet. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- Krisiandi, 2016, *Pidana Alternatif Perlu Didorong*. dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/20460671/pidana.alternatif.perlu.didorong>, diakses tanggal 6 April 2017
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, diunduh tanggal 6 April 2017.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
- Marjanne Termorshuizen Arts, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda*, Makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana *Same Root, Different Development*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 3-4 April, 2006.

- Masalah masalah Hukum, Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002,
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005,
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Setio Dwi, 2016, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*. dari <http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, diakses tanggal 18 April 2017
- Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi ke-4, Cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1999,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 33. Dalam Yasser S. Wahab, Julianto J.J. Kalalo, dan Lisa Mery, *Penggunaan Email sebagai Sarana Beracara dalam Contante Justitie Pada Pengadilan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review (Halrev), Volume I Issue 2, August 2015.
- Sutherland & Cressey, *The Control Crime*, Dalam “Hukum dalam Perkembangan Hukum Pidana”, Sudjono, Tarsito, Bandung, 1974,
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009,

Wawancara dengan Sdri Antik, Sdr. Supardi dan Sdr. Teguh, selaku Bendahara Penerima Eksekusi Putusan Hakim di Kejaksaan Negeri se-Malang Raya, pada tanggal 4 September 2018

Wawancara dengan Erin, Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 30 Agustus 2018

